



Implementasi Sistem Manajemen Kearsipan Digital di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Bandung Mini Riset Otonomi & Pemerintahan Lokal

Iyep Saefulrahman¹, Rafarza Muhammadi², Muhammad Faiz Dwi Sakti^{3*}, Justin Nabil Alpasha⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Manajemen Kearsipan Digital (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Srikandi di Kota Bandung memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan arsip, tetapi menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, adaptasi teknologi, dan keterbatasan anggaran. Meski demikian, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong standar pengelolaan arsip nasional memberikan landasan strategis bagi keberhasilan sistem ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Srikandi memerlukan dukungan lebih besar melalui pelatihan intensif, peningkatan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pendekatan yang terintegrasi, digitalisasi arsip dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Kata Kunci : Sistem Manajemen Kearsipan Digital, Tata Kelola Pemerintahan, Transformasi Digital

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2171>

*Correspondence: Muhammad Faiz Dwi Sakti

Email:

muhammad23162@mail.unpad.ac.id

Received: 20-04-2025

Accepted: 20-05-2025

Published: 21-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Digital Archival Management System (Srikandi) at the Library and Archives Office of Bandung City as part of digital transformation in local governance. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results reveal that Srikandi has the potential to enhance efficiency and transparency in archival management but faces significant challenges, including limited skilled human resources, technological adaptation, and budget constraints. Nevertheless, the national policy promoting standardized archival management provides a strategic foundation for its success. The study concludes that implementing Srikandi requires stronger support through intensive training, infrastructure development, and synergy between central and local governments. With an integrated approach, digital archiving can advance more efficient, accountable, and responsive governance.

Keyword: Digital Archival Management System, Governance, Digital Transformation

Pendahuluan

Arsip memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, baik sebagai sumber informasi strategis untuk mendukung pengambilan keputusan maupun sebagai dasar pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pemerintahan daerah, arsip tidak hanya sekedar kumpulan dokumen historis, tetapi juga merupakan bukti otentik yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan pengelolaan arsip yang baik, pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada Masyarakat (Philibín, 2023).

Namun, pengelolaan arsip secara manual yang masih diterapkan di berbagai instansi pemerintahan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mencari dokumen secara cepat dan efisien akibat sistem pengarsipan yang tidak terorganisir dengan baik. Selain itu, arsip dalam bentuk fisik rentan terhadap kerusakan, baik karena faktor usia, kondisi lingkungan yang tidak mendukung, maupun bencana alam seperti banjir atau kebakaran. Masalah lainnya adalah keterbatasan ruang penyimpanan, terutama di instansi yang memiliki volume arsip fisik yang terus bertambah seiring waktu, sehingga menyulitkan pengelolaan yang optimal (Konsa, 2023).

Seiring perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital saat ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif melalui penerapan Srikandi (*Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi*). Srikandi adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan arsip secara digital di lingkungan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui penerapan Srikandi, pemerintah bertujuan menciptakan pengelolaan arsip yang terstandarisasi, efektif, dan efisien guna mempercepat transformasi digital di sektor public (Abney, 2024).

Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan arsip menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas wilayah masing-masing, termasuk dalam pengelolaan arsip. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mendorong inovasi lokal, termasuk dalam penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung sebagai salah satu perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan arsip sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mencakup efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (Kalarikkal, 2024).

Namun, penerapan sistem manajemen arsip digital di tingkat daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, otonomi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran

yang memadai, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Dalam kasus Kota Bandung, meskipun memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan sistem arsip digital melalui Srikandi, masih diperlukan upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kendala implementasi serta mendukung keberlanjutan sistem ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana aspek otonomi daerah mempengaruhi implementasi sistem manajemen arsip digital di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi penerapan Srikandi di Kota Bandung sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan era digital (Nishioka, 2024).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi sistem manajemen kearsipan digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika, persepsi, dan kendala yang terkait dengan sistem manajemen kearsipan digital yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek subjektif, seperti persepsi staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang aplikasi yang digunakan, serta tantangan dalam penggunaannya (Russell, 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Proses pengelolaan arsip digital

Siklus Pengelolaan Kearsipan

Proses pengolahan arsip digital yang melibatkan perangkat daerah dan transformasi dari arsip konvensional ke arsip elektronik, sebagaimana yang diuraikan dalam wawancara, mencakup beberapa tahapan penting dan menghadapi tantangan tertentu. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Tahapan Pengolahan Arsip Digital

a. *Penciptaan Arsip*

- Definisi: Tahapan awal saat dokumen atau arsip dibuat untuk keperluan administratif.
- Implementasi di Kota Bandung: Menggunakan aplikasi lokal bernama *Pesona* yang dirancang untuk mencatat dan menyimpan surat elektronik secara internal.

b. *Penggunaan Arsip*

- Definisi: Arsip yang telah dibuat digunakan oleh berbagai pihak untuk keperluan operasional, seperti surat-menyurat antar perangkat daerah.
- Implementasi: Surat elektronik antar perangkat daerah di Kota Bandung sebagian besar telah menggunakan *Pesona*. Namun, untuk korespondensi dengan kementerian dan lembaga pusat, diwajibkan menggunakan *Srikandi*.

c. *Pemberkasan Arsip*

- Definisi: Proses pengaturan dan penyimpanan arsip secara sistematis untuk memudahkan aksesibilitas.
- Implementasi: Di *Srikandi*, pemberkasan arsip telah diintegrasikan. Namun, pada *Pesona*, fitur ini belum tersedia.

d. *Penyusutan Arsip*

- Definisi: Tahapan akhir dalam siklus hidup arsip yang mencakup pemusnahan atau pengarsipan permanen.
- Implementasi: Fitur penyusutan arsip sudah tersedia di *Srikandi*, tetapi belum ada dalam *Pesona*.

2. Transformasi ke Sistem Arsip Digital

a. *Sistem Srikandi*

- Sistem *Srikandi* (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) dirancang sebagai platform nasional untuk mengelola arsip digital, mulai dari penciptaan hingga penyusutan.
- Kota Bandung sedang dalam proses transisi dari *Pesona* ke *Srikandi* sesuai arahan pemerintah pusat.

b. *Penggunaan Bertahap*

- Transformasi dimulai dari tingkat internal, seperti penggunaan *Srikandi* untuk nota dinas, dan akan diperluas secara bertahap ke seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.

3. Tantangan dalam Transformasi

a. *Teknologi*

- Kapasitas Server: Server pusat sering mengalami gangguan, seperti lambatnya pemrosesan data saat pelatihan atau penginputan struktur organisasi.
- Interoperabilitas: Menyesuaikan sistem lokal (*Pesona*) dengan sistem nasional (*Srikandi*) membutuhkan waktu dan usaha.

b. *Regulasi*

- Peraturan pendukung, seperti Peraturan Wali Kota, masih dalam tahap penyusunan sehingga pelaksanaan *Srikandi* belum sepenuhnya terintegrasi.

c. *Operasional*

- Proses penginputan data struktur organisasi untuk setiap perangkat daerah memakan waktu yang lama.
- Banyak perangkat daerah masih dalam tahap pengenalan dan adaptasi dengan sistem baru.

d. *Daya Manusia (SDM)*

- Kesadaran dan Kemauan Belajar: Sebagian pegawai merasa kesulitan meskipun sistem *Srikandi* sebenarnya memiliki fitur yang lebih lengkap dan mudah digunakan.
- Pelatihan: Dibutuhkan lebih banyak pelatihan agar pegawai dapat mengoperasikan *Srikandi* dengan optimal.

4. Evaluasi dan Langkah ke Depan

- Pemerintah Kota Bandung sedang mengumpulkan umpan balik dari perangkat daerah untuk mengatasi kendala implementasi.
- Sistem *Srikandi* akan terus diperkenalkan secara bertahap hingga seluruh perangkat daerah dapat menggunakannya.
- Diharapkan pada masa mendatang, semua arsip akan dikelola secara terintegrasi menggunakan *Srikandi*, sehingga efisiensi pengelolaan arsip dapat tercapai.

5. Kolaborasi Antar Instansi

- Enam lembaga utama, termasuk BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan ANRI, berkolaborasi untuk melaksanakan implementasi *Srikandi* dengan tujuan yang sama dan langkah-langkah yang terarah.
- Kolaborasi ini bertujuan memastikan keseragaman sistem arsip digital di seluruh Indonesia.

Perkembangan Sistem Pengelolaan Arsip Digital

Perkembangan sistem pengelolaan arsip digital di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendigitalisasi arsip melalui sistem informasi yang lebih terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung, misalnya, telah mengimplementasikan *Pesona* sebagai aplikasi lokal untuk pengelolaan persuratan dan arsip elektronik sejak awal 2000-an. Sistem ini mencakup tahapan penciptaan dan penggunaan arsip, meskipun belum mencakup penyusutan dan pemberkasan secara menyeluruh. Namun, transformasi ke sistem baru yang lebih komprehensif, yaitu *Srikandi* (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), kini sedang diupayakan untuk mengakomodasi seluruh siklus hidup arsip secara nasional. Penerapan *Srikandi* menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan regulasi. Dalam wawancara disebutkan, "*Kadang-kadang, orang Indonesia tuh belum mencoba sudah bilang susah, padahal sebenarnya fitur-fiturnya lebih mudah dibandingkan aplikasi sebelumnya seperti Pesona.*" Selain itu, tantangan teknologi juga menjadi perhatian karena kendala server sering menghambat proses penginputan data struktur organisasi dan nama-nama pemegang jabatan di perangkat daerah. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa sistem ini dikelola melalui kerja sama lintas kementerian, sehingga koordinasi antar lembaga menjadi lebih kompleks (Marciano, 2024).

Meskipun tantangan tersebut masih ada, langkah-langkah untuk mempercepat implementasi terus dilakukan, termasuk melalui pelatihan, laporan progres, dan monitoring. "*Kami bikin grup Srikandi di lingkungan Kota Bandung, sama seperti yang pusat lakukan, untuk memudahkan koordinasi,*" ungkap narasumber. Ke depannya, penggunaan *Srikandi* diharapkan tidak hanya mencakup nota dinas internal, tetapi juga seluruh kebutuhan persuratan dan pengelolaan arsip antar lembaga, sehingga tercipta sistem pengarsipan digital yang efektif dan efisien (Gooding, 2024).

B. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Arsip Digital

Faktor Pendukung Pengelolaan Arsip

Faktor pendukung pengelolaan arsip digital di Kota Bandung melibatkan beberapa aspek yang mendukung kelancaran sistem tersebut. Salah satu faktor utama adalah adanya aplikasi arsip yang sudah dikembangkan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pengelolaan arsip lebih terorganisir dan memudahkan akses terhadap data yang diperlukan. Penggunaan aplikasi ini memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan pencarian arsip secara digital, yang mengurangi ketergantungan pada arsip fisik yang memakan ruang dan lebih rentan terhadap kerusakan. Selain itu, dengan adanya aplikasi tersebut, efisiensi dalam pengelolaan arsip dapat tercapai, yang pada akhirnya memudahkan dalam proses pelaporan dan pengawasan. Faktor pendukung lainnya adalah dukungan dari kelompok kerja yang terorganisir dan terfokus dalam pengelolaan arsip. Dalam hal ini, pembentukan grup Srikandi untuk memantau dan melaporkan perkembangan sistem pengelolaan arsip di Kota Bandung menunjukkan komitmen dalam memperbaiki dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Keberadaan grup ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antar tim, sehingga jika ada kendala atau masalah terkait arsip, dapat segera ditangani. Komitmen dan koordinasi yang baik antar anggota tim pengelola arsip juga menjadi faktor pendukung yang penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan implementasi sistem arsip digital yang lebih terintegrasi (Layne-Worthey, 2024).

Faktor Penghambat Pengelolaan Arsip

Dalam wawancara ini, kami telah mengidentifikasi banyak faktor penghambat, membius keberhasilan program pelaksanaan. Namun, sejumlah kendala lain masih perlu diatasi pula, salah satunya ialah sumber daya manusia. Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa "kami kurang start juga di sini gini mengerjakan banyak jadi kadang-kadang semua pekerjaan dilakukan oleh satu orang yang staf" (27:01). Hal ini menyebabkan staf harus mengerjakan berbagai tugas sekaligus, seperti membuat laporan keuangan, arsip, dan surat elektronik, yang seharusnya dapat dibagi ke beberapa orang. Keterbatasan personel ini juga dipengaruhi oleh kurangnya tenaga ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada, sementara tenaga outsourcing menjadi solusi sementara (Müngen, 2024). Selain itu, masalah lain yang juga disoroti adalah ketidakterpaduan dalam penerapan sistem arsip digital. Salah seorang narasumber mengungkapkan, "Kami sudah punya aplikasi sendiri, itu kan tiba-tiba itu kan butuh biaya yang lumayan besar. Pasti waktu kita membuat itu kan diskos pasti mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tiba-tiba sekarang muncul nih yang harus dari pusat otomatis kan itu jadi tidak terpakai" (28:58). Hal ini menggambarkan betapa pengaruh kebijakan pusat terhadap pelaksanaan di daerah bisa mempengaruhi penggunaan sistem yang sudah ada, bahkan menyebabkan pemborosan anggaran daerah yang sudah dialokasikan sebelumnya.

Selain itu, faktor motivasi juga menjadi salah satu kendala, seperti yang disampaikan: "Kendalanya cuma rasa malas ya". Kendala ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya rasa keterlibatan atau passion dalam pekerjaan, yang berujung pada rendahnya motivasi di kalangan staf. Dengan demikian, kendala utama yang

dihadapi terkait pelaksanaan program ini mencakup kekurangan SDM, ketidakterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah, serta rendahnya motivasi kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal.

C. Pengembangan SDM dalam Sistem Pengelolaan Arsip Digital **Bentuk Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip**

Berikut adalah bentuk pengembangan sistem pengelolaan arsip nya :

1. Penggunaan Sistem Srikandi dan SIKD

Pengembangan pengelolaan arsip dilakukan melalui implementasi sistem aplikasi seperti Srikandi dan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Daerah). Srikandi merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola arsip dinamis yang lebih terstruktur dan bisa diakses secara elektronik oleh seluruh instansi pemerintah. SIKD digunakan untuk mendigitalisasi arsip yang memiliki nilai sejarah dan dapat diakses oleh publik melalui sistem informasi kearsipan nasional (SIKN). Meskipun sudah diterapkan, ada tantangan dalam pembaruan dan pemeliharaan data, yang masih membutuhkan pengawasan dan perbaikan.

2. Arsip Dinamis dan Statis

Arsip terbagi menjadi dua jenis: arsip dinamis (yang aktif dan inaktif) dan arsip statis (yang memiliki nilai sejarah tinggi). Arsip dinamis dikelola menggunakan sistem Srikandi dan memiliki pengaturan ketat terkait akses dan keamanan informasi, sedangkan arsip statis lebih kepada arsip yang sudah terpublikasi dan dapat diakses masyarakat melalui sistem SIKN.

3. Pemeliharaan dan Pelatihan

Pengelolaan arsip memerlukan pelatihan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Pelatihan harus dilakukan di setiap OPD dan kecamatan di Kota Bandung agar mereka memahami dan menggunakan sistem pengelolaan arsip tersebut seefektif mungkin. Kendala yang dihadapi dalam implementasi termasuk masalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan masalah teknis dalam pengelolaan sistem.

4. Audit dan Penilaian dari Pusat

Proses audit dan penilaian oleh pusat dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Penilaian ini mencakup pengelolaan arsip di tingkat daerah dan memastikan bahwa sistem yang digunakan sudah memenuhi ketentuan.

5. Keterlibatan SDM dan Tenaga Outsourcing

Pengelolaan arsip membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pimpinan dinas hingga staf. Namun, karena keterbatasan SDM, beberapa tenaga outsourcing juga dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan arsip. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah ada, tantangan terkait dengan sumber daya manusia masih menjadi isu utama dalam pengelolaan arsip.

Program Evaluasi Sistem Pengelolaan Arsip

Program evaluasi sistem pengelolaan arsip di Kota Bandung berfokus pada implementasi dan pengembangan aplikasi Srikandi yang dimulai pada tahun 2002. Aplikasi

ini digunakan untuk mengelola arsip secara digital, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen dan arsip di berbagai instansi pemerintah. Meskipun aplikasi ini sudah diluncurkan pada versi 3, tantangan utama yang dihadapi adalah transisi dari sistem lama ke sistem baru, yang memerlukan adaptasi dari pengguna yang sudah terbiasa dengan sistem sebelumnya. Kendala teknis seperti error pada aplikasi seringkali menghambat kelancaran operasional, yang menyebabkan penggunaan sistem lama tetap berlangsung paralel hingga sistem Srikandi dinyatakan lebih stabil dan siap digunakan sepenuhnya.

Evaluasi terhadap sistem ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di Kota Bandung. Pelatihan dan bimtek diberikan untuk memastikan bahwa setiap instansi dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik, serta mengatasi kendala yang mungkin timbul. Secara bertahap, sistem ini diharapkan akan sepenuhnya menggantikan proses manual dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan arsip. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus, baik di tingkat daerah maupun pusat, bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan, memperbaiki sistem, dan memberikan solusi bagi kendala yang muncul dalam implementasinya.

D. Pengaruh Kebijakan Pemerintah pada Pelaksanaan Sistem Arsip Digital

Pengaruh Kebijakan Pemerintah pada Otonomi Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung

Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap otonomi daerah, khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, sangat besar, terutama terkait dengan pelaksanaan sistem arsip digital dan pengelolaan arsip di tingkat daerah. Beberapa pengaruh yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan Pusat pada Daerah

Kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan penggunaan sistem arsip digital tertentu, seperti Srikandi, mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. Walaupun Kota Bandung sudah memiliki sistem arsip digital sendiri, yaitu Pesona, yang telah berjalan, kebijakan pusat mengharuskan pengadopsian Srikandi. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengikuti kebijakan tersebut meskipun ada sistem lain yang sudah berjalan, yang mengarah pada pemborosan anggaran dan peralihan sistem yang memakan waktu dan sumber daya.

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran

Kebijakan pemerintah pusat sering kali menuntut penerapan sistem tertentu yang memerlukan biaya besar untuk implementasi, seperti dalam kasus Srikandi. Di sisi lain, sistem yang sudah ada, seperti Pesona, telah menggunakan anggaran daerah yang cukup besar untuk pengembangannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan sistem yang berbeda, anggaran yang sudah digunakan untuk sistem sebelumnya menjadi kurang efektif, dan ini mempengaruhi keuangan daerah.

3. Pengaruh pada Proses Pengambilan Keputusan Daerah

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, kebijakan dari pemerintah pusat seperti penerapan sistem arsip digital yang seragam, mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, meskipun pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola arsip secara mandiri, keputusan untuk mengganti atau mengintegrasikan sistem arsip yang ada dengan kebijakan pusat dapat memperlambat proses adaptasi dan implementasi di tingkat daerah.

4. Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional

Meskipun ada tantangan dalam hal sumber daya dan sistem yang sudah ada, kebijakan pemerintah pusat seperti yang tercermin dalam penerapan Srikandi bertujuan untuk menyelaraskan sistem arsip di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Hal ini memastikan bahwa semua daerah mengikuti standar yang sama dalam hal pengelolaan arsip digital, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan arsip di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap otonomi daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, baik dalam hal pengelolaan arsip digital, penggunaan anggaran, dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan kebijakan pusat yang mengharuskan penerapan sistem seragam sambil tetap mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang ada di daerah.

Pengaruh Dalam Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung

Pengaruh anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dapat dijelaskan dari beberapa aspek berdasarkan data yang ada:

1. Anggaran yang Sudah Digunakan untuk Pesona

Sebelum adanya kebijakan untuk beralih ke sistem Srikandi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung mengalokasikan sejumlah besar anggaran untuk pemeliharaan sistem arsip digital Pesona. Anggaran ini juga mendukung pengembangan sistem tersebut. Sistem ini telah berjalan selama beberapa tahun, dengan pengeluaran yang signifikan untuk pengadaan dan operasional, termasuk perangkat keras dan pengembangan perangkat lunak. Namun, dengan munculnya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan penggunaan Srikandi, sistem Pesona kini tidak lagi digunakan secara maksimal, sehingga anggaran yang telah dikeluarkan terasa terbuang. Hal ini menunjukkan dampak pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan anggaran daerah, di mana pengeluaran yang sudah dilakukan tidak sepenuhnya efisien karena adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan penggunaan sistem yang berbeda.

2. Pengaruh Pemotongan Anggaran

Karena kebijakan pusat mengharuskan penggunaan Srikandi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung menghadapi tantangan dalam pengalokasian anggaran yang terbatas. Pemotongan anggaran dapat terjadi karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru, meskipun anggaran untuk sistem arsip sebelumnya sudah dialokasikan untuk Pesona. Hal ini berpotensi mengurangi dana yang tersedia untuk

pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut dari sistem arsip digital, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas layanan dan efisiensi sistem pengarsipan di Kota Bandung.

3. Pengalokasian Anggaran untuk Pemeliharaan

Anggaran yang tersedia lebih banyak digunakan untuk pemeliharaan dan operasional perangkat keras dan fasilitas yang mendukung sistem arsip digital, seperti pengadaan komputer, kabel, dan koneksi internet. Hal ini mencerminkan bagaimana anggaran daerah lebih difokuskan pada pemeliharaan peralatan yang sudah ada, daripada pengembangan sistem arsip digital baru. Meskipun aplikasi Srikandi sudah diberikan oleh pemerintah pusat, pengadaan fasilitas dan pemeliharaan tetap memerlukan anggaran daerah agar sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik.

4. Keterbatasan Dana untuk Pengembangan Sistem Arsip

Karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung sudah menginvestasikan dana besar untuk Pesona, pengalokasian anggaran untuk sistem arsip digital yang baru, seperti Srikandi, sangat terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi pengembangan dan pemeliharaan sistem arsip digital yang lebih komprehensif, termasuk biaya untuk pelatihan staf dan integrasi sistem. Anggaran yang terbatas dapat menghambat efektivitas transisi dan implementasi sistem arsip digital yang lebih baru, yang dapat berujung pada penurunan kualitas pengelolaan arsip di tingkat daerah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kota Bandung telah mengambil langkah signifikan dalam digitalisasi arsip melalui implementasi Srikandi (*Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi*). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, memastikan keamanan data, dan mempermudah akses bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Namun, proses transisi dari sistem lokal seperti Pesona menuju Srikandi masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidakterpaduan sistem, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta resistensi terhadap perubahan dari metode manual ke digital.

Ada sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Srikandi di Kota Bandung. Di antaranya adalah kebijakan nasional yang memberikan panduan jelas, adanya kemajuan teknologi yang mendukung digitalisasi, serta komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan transformasi ini. Di sisi lain, berbagai hambatan juga muncul, seperti keterbatasan anggaran, kendala teknis pada kapasitas server, dan adaptasi pegawai yang belum optimal terhadap penggunaan teknologi baru. Hambatan-hambatan ini memperlambat proses integrasi dan mengurangi efektivitas penerapan sistem.

Kebijakan pemerintah pusat untuk menyeragamkan pengelolaan arsip di seluruh Indonesia melalui Srikandi memberikan manfaat besar dalam membangun sistem yang standar dan terintegrasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, terutama bagi daerah yang sebelumnya telah mengembangkan sistem lokal. Kota Bandung, misalnya, harus melakukan penyesuaian yang tidak hanya memerlukan waktu tetapi juga sumber daya tambahan. Meski demikian, penerapan digitalisasi arsip tetap memberikan

keuntungan seperti pengurangan ketergantungan pada arsip fisik, akses yang lebih cepat, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dokumen pemerintah.

Secara keseluruhan, implementasi Srikandi di Kota Bandung merupakan langkah strategis yang mendukung modernisasi tata kelola pemerintahan daerah. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan yang lebih besar, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan anggaran yang memadai, dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kolaborasi yang efektif, sistem pengelolaan arsip digital ini diharapkan dapat mendukung pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abney, A. (2024). Conscious Editing-Driven Metadata for Archives and Digital Collections: A Case Study. *Journal of Academic Librarianship*, 50(5). <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102909>
- Darmansah, T., Syevila, S., Lativah, H., Khairi, M. A., & Tanjung, W. K. (2024). Penerapan manajemen kearsipan untuk meningkatkan kinerja administrasi pendidik. *Mahir: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(1)
- Euis F, Aprilia Q. (2024, 28 November). *Wawancara mengenai implementasi sistem manajemen arsip digital di Dinas Kearsipan Kota Bandung dengan Arsiparis Madya*. Bandung, Indonesia.
- Gooding, P. (2024). Libraries, Archives, And The Born- Digital Humanities. *The Routledge Companion to Libraries, Archives, and the Digital Humanities*, 157–168. <https://doi.org/10.4324/9781003327738-14>
- Iswardhana, M. R., & Attamimi, A. M. S. (2023). Efektivitas penerapan kebijakan otonomi daerah dalam penurunan tingkat kemiskinan di Bandung Barat tahun 2019. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6(2), 108-126.
- Kalarikkal, S. A. (2024). Enhancing access to missionary archives: the role of digital libraries and online repositories. *Library Hi Tech News*. <https://doi.org/10.1108/LHTN-04-2024-0056>
- Konsa, K. (2023). Does the digital information system unify information institutions: convergence of museums, archives, and libraries? *Ajalooline Ajakiri*, 183(1), 47–75. <https://doi.org/10.12697/AA.2023.1.03>
- Layne-Worthey, G. (2024). Editors' Introduction To Libraries, Archives, And The Digital Humanities. *The Routledge Companion to Libraries, Archives, and the Digital Humanities*, 1–14. <https://doi.org/10.4324/9781003327738-1>
- Marciano, R. (2024). Bridging Traditional Digital Humanities And Archives Through Computational Archival Science. *The Routledge Companion to Libraries, Archives, and the Digital Humanities*, 55–70. <https://doi.org/10.4324/9781003327738-6>
- Müngen, A. A. (2024). Personalised publication recommendation service for open-access digital archives. *Journal of Information Science*, 50(3), 703–712. <https://doi.org/10.1177/01655515221101837>

- Nishioka, C. (2024). Development Of An Iiif- Compatible Digital Collection And Image Usage Analysis: The Case of the Kyoto University Rare Materials Digital Archive. *The Routledge Companion to Libraries, Archives, and the Digital Humanities*, 316–328. <https://doi.org/10.4324/9781003327738-25>
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018).
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2021).
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Philibín, C. N. (2023). Surfing the Irish Folklore Commission’s Schools’ Collection: New beginnings in the democratisation of learning through digital archives. *New Beginnings: Perspectives from France and Ireland*, 219–239. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85181630232&origin=inward>
- Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan good governance melalui kerangka otonomi daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 2(1), 80-93.
- Russell, I. G. (2024). The Routledge Companion To Libraries, Archives, And The Digital Humanities. *The Routledge Companion to Libraries, Archives, and the Digital Humanities*, 1–547. <https://doi.org/10.4324/9781003327738>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).
- Yuliah, E. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.